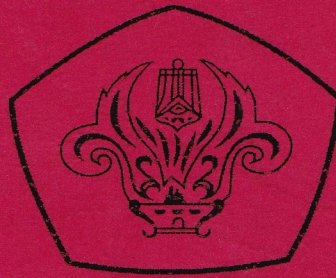


LAPORAN AKHIR PENELITIAN



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**PENEGAKAN HUKUM TIDAK PIDANA PEMILU TENTANG LARANGAN
PELAKSANAAN KAMPANYE DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS
PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALU**

Oleh :

Hery Firmansyah S.H., M.Hum.,MPA

Gunawan Djajaputra, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANGARA
JAKARTA**

2019

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENELITI	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
STUDI PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana Pemilu	8
A. Karakteristik Tindak Pidana Pemilu	10
C. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu	14
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
A. Sifat Penelitian	16
B. Bahan Penelitian	16
C. Jalannya Penelitian	19
D. Analisis Data	20
BAB IV	21
DATA HASIL PENELITIAN	21
A. Profil Provinsi Palu	21
B. Tindak Pelanggaran Pemilu	23
C. Data Hasil Wawancara	38
BAB V	52
ANALISIS	52
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

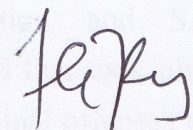
IDENTITAS PENELITI

1. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tentang Larangan Pelaksanaan Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, Dan Tempat Pendidikan Pada Pengadilan Negeri Palu
2. Ketua Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA
 - b. JenisKelamin : Laki – laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. JabatanStruktural : Lektor / III C
 - e. JabatanFungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat : Jl Godean Km 9, Yogyakarta
 - h. Telepon / Fax : (021) 5447740
 - i. Email : heryf@fh.untar.ac.id
3. Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 10288010
 - d. Jabatan Struktural : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Telepon / Fax : 085718034038
 - i. Email : gunawand@fh.untar.ac.id
4. Jangka Waktu Penelitian : Januari-Juni 2019
5. Pembiayaan :
 - a. Jumlah Biaya yang disetujui LPPI :
 - a) Biaya Tahap 1 yang diajukan LPPI :
 - b) Biaya Tahap 2 yang diajukan LPPI :

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Jakarta, 25 Juni 2019

Ketua Peneliti



r. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
NIP : 10291010

Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
NIP : 198401182009121005

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Publikasi Ilmiah

Jap Tji Beng., PhD
NIP : 100381047

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah memperkenankan tim penulis melakukan dan menyelesaikan proposal penelitian. Tanpa perkenaan tersebut, tiada sesuatu dapat terjadi, termasuk proposal penelitian ini. Hal ini merupakan bagian internal dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi dalam menjalankan/memenuhi kewajiban profesi yang digelutinya.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berbagai hal. Mengingat pentingnya permasalahan yang dikaji, dipandang perlu untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi lanjutan oleh tim lain sehingga dapat diperoleh data, fakta dan informasi yang lebih menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Demikian, semoga bermanfaat.

Hormat Kami
Tim Penulis



SURAT KETERANGAN

No.: 874A -Pus/FH-Untar/VI/2019

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima Laporan Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu tentang Larangan Pelaksanaan Kampanye dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan pada Pengadilan Negeri Palu
Penulis/Peneliti	Ketua : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2019

Perpustakaan Fakultas Hukum

Nora Varera W. S.I.P.



A. Ringkasan

Pemilu merupakan sarana kedaluatan rakyat yang dilaksanakan sebagai amanat reformasi untuk memilih wakil rakyat dan yang paling utama meningkatkan kesadaran politik rakyat. Pemilu yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab IV tentang Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan bertujuan mrnjamin adanya kepastian hukum yang menjelaskan secara tegas beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud. Tujuan adanya larangan dalam pesta demokrasi adalah demi terwujudnya pemilihan umum yang berintergrasi, berkualitas, dan berwibawa dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam konsentrasi politik lima tahunan tersebut. Maraknya pelanggaran yang dilakukan diantaranya perusakan dan penurunan alat peraga kampanye, politik uang, dan SARA. Maraknya kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di Palu merupakan bentuk urgensi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dengan ini mengingat Pasal 521 *jo* Pasal 280 Ayat (1) Huruf h *jo* Pasal 493 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran, Pidana

B. Summary

Elections are a means of expiring the people to be carried out as a reform mandate to elect people's representatives and most importantly raise people's political awareness. Elections as stipulated in the Election Law No. 7 of 2017 & the Criminal Code Book II Chapter IV concerning Crimes Against the Implementation of Obligations and Rights of State aims to guarantee the existence of legal certainty which clearly states some prohibitions and legal sanctions for election participants who violate the provisions as intended. The purpose of the prohibition in the party of democracy is for the realization of integrated, quality and authoritative elections and avoiding undesirable things in the five-year political concentration. The rise of violations committed includes the destruction and decline of campaign props, money politics, and SARA. The rise of cases of violations of criminal acts of general elections that took place in Palu is a form of urgency in terms of law enforcement against criminal offenses which hereby remember Article 521 *jo* Article 280 Paragraph (1) Letter h *jo* Article 493 of Law No. 7 of 2017 concerning General Election Crimes.

Keywords: Election Crimes, Violations, Criminal Cases